

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peternakan sebagai sub sektor pertanian memiliki peran utama dalam perekonomian dan pembangunan sumber daya manusia Indonesia seutuhnya. Peran utama dimaksud terlihat dari fungsi produk peternakan sebagai sumber protein hewani yang penting bagi pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia.

Sebagai bagian dari pembangunan wilayah pedesaan (*rural development*), pembangunan peternakan menitik beratkan pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf kehidupan masyarakat desa. Pengembangan ternak sapi potong telah sejak lama dilakukan di Indonesia bahkan sebelum Indonesia merdeka, misalnya pemerintah Hindia Belanda mendatangkan jenis sapi Ongole dalam rangka memperbaiki kualitas sapi lokal di Indonesia. Pada akhirnya berkembang menjadi jenis sapi tersendiri yaitu sapi peranakan ongole (PO) yang diklaim sebagai jenis sapi Indonesia saat ini. Setelah Indonesia sudah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah baik pada masa orde lama, orde baru dan era reformasi untuk pengembangan peternakan sapi potong.

Pada era pemerintahan orde lama, upaya pengembangan usaha peternakan umumnya dan sapi potong khususnya secara yuridis di kuatkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan. Keberadaan Undang-undang ini menjadi landasan hukum untuk setiap kebijakan dan program pembangunan peternakan dan kesehatan hewan dalam rangka meningkatkan peranan sub sektor peternakan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat.

Di Indonesia pemeliharaan sapi potong pada umumnya dilakukan dalam skala usaha kecil yang dikenal dengan peternakan rakyat. Jumlah kepemilikan hanya berkisar antara dua sampai tiga ekor untuk setiap petani dan dipelihara sebagai usaha sambilan dari usaha tani tanaman pangan ataupun perkebunan. Namun demikian, usaha peternakan rakyat ini tetap memegang peranan penting, baik dalam upaya menyediakan kebutuhan daging secara nasional maupun

terhadap ekonomi keluarga petani yang sering dijadikan sebagai tabungan keluarga dan akan dipergunakan pada saat membutuhkan uang yang jumlahnya relatif besar.

Berdasarkan kondisi yang demikian maka pemerintah melalui Direktorat Jendral Peternakan memberikan perhatian khusus terhadap upaya pengembangan sapi potong rakyat. Di era otonomi daerah, pemerintah daerahpun memiliki sejumlah program untuk memperbaiki perekonomian masyarakat khususnya petani melalui bantuan ternak sapi potong seperti program gerakan pencehajaeraan petani, gerakan pemberdayaan masyarakat pesisir, integrasi tanaman dengan ruminansia, budidaya sapi potong, satu petani satu sapi, penyelamatan betina produktif, sapi kawasan terpadu dan pendistribusian bibit ternak pada masyarakat. Dalam periode lima tahun terakhir (2013-2017), pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman telah memberikan bantuan sapi sebanyak 661 ekor yang diberikan kepada anggota masyarakat yang tergabung dalam 55 kelompok tani.

Bila sapi bantuan tersebut dapat dikembangkan dengan baik, diharapkan mampu meningkatkan populasi sapi potong di Kabupaten Padang Pariaman. Pada gilirannya diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan peternak penerima bantuan tersebut. Namun demikian bila dilihat dari perkembangan populasi sapi potong serta skala usaha dan orientasi pemeliharaannya tidak terlihat perobahan yang signifikan. Di Kabupaten Padang Pariaman perkembangan populasi sapi potong dalam lima tahun terakhir hanya 2,81 % (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Padang Pariaman, 2020). Pola pemeliharaan tetap saja dilakukan secara konvensional.

Pertanyaan nya adalah, apakah sapi potong yang diberikan kepada penerima (recipient) dapat berkembang dengan baik? Ataukah sapi yang diterima tidak mampu dikembangkan/tidak berlanjut sehingga tidak berimplikasi terhadap populasi? Berangkat dari dua pertanyaan pokok diatas, maka dilakukan penelitian dengan judul : **KEBERLANJUTAN USAHA PETERNAKAN SAPI POTONG PROGRAM BANTUAN PEMERINTAH DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN.**

B. Masalah Penelitian

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu :

1. Bagaimana keberlanjutan usaha pemeliharaan sapi potong bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman.
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberlanjutan usaha peternakan sapi potong program bantuan pemerintah tersebut.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang dirumuskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui keberlanjutan usaha pemeliharaan sapi potong bantuan dari pemerintah pada masyarakat.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan usaha peternakan sapi potong program bantuan pemerintah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan informasi bagi keberlanjutan usaha peternakan sapi potong dalam mengembangkan ternak sapi potong program bantuan pemerintah.
2. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan kebijakan memberikan bantuan sapi potong untuk meningkatkan kesejahteraan peternak.